

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi kebijakan merupakan Salah satu langkah penting dalam struktur pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang melibatkan pelaksanaan keputusan dasar yang telah dibuat, seringkali dalam bentuk undang-undang (Roring, dkk., 2021:5). Namun, tidak jarang kebijakan juga dibuat dalam bentuk keputusan eksekutif yang signifikan atau perintah. Termasuk dalam keputusan ini adalah identifikasi masalah yang harus diselesaikan, penentuan sasaran yang jelas, dan penyediaan berbagai metode untuk mengorganisir dan mengelola proses implementasi kebijakan. Proses implementasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi dan misi kebijakan. Sukses dalam menerapkan kebijakan memerlukan struktur yang jelas dan mekanisme pengaturan yang baik untuk memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara optimal (Setyasih, 2023:50).

Karmasih & (2021:14) menyatakan bahwa dalam konteks manajemen kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Melalui implementasi, dapat terlihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dalam struktur organisasi dan proses kerja yang ada. Pentingnya implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada aspek isolasi, tetapi juga pada kemampuannya untuk memperlihatkan keterkaitan dan interdependensi dengan faktor-faktor lain yang

memengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, implementasi kebijakan membantu menghubungkan antara kebijakan yang dirumuskan dengan prestasi kerja yang diharapkan. Dengan memahami hubungan ini, organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya dan mengidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bukan hanya merupakan langkah teknis semata, tetapi juga suatu proses analitis yang memungkinkan organisasi untuk memahami dinamika internalnya dan menyesuaikan kebijakan secara responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasional (Subyantoro & Suwanto,2020:53).

Evaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu perspektif proses dan hasil. Proses implementasi memainkan peran sentral dalam menilai efektivitas suatu kebijakan, karena menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Untuk mengukur keberhasilan, fokus pada pencapaian tujuan kebijakan menjadi kriteria krusial. Artinya, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan sejauh mana tujuan-tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut tercapai di dunia nyata (Wahab,2021:11).

Inisiatif yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu disebut kebijakan publik. Usulan tersebut mencakup pembatasan-pembatasan dan harapan-harapan terhadap kebijakan yang diajukan, dengan tujuan utama untuk mencapai suatu target atau melaksanakan suatu tujuan tertentu. Sementara itu, pembangunan merupakan suatu proses yang bersifat

sistematis dan berkelanjutan, dirancang untuk membentuk kondisi yang mampu menyediakan berbagai alternatif guna mencapai tujuan yang bersifat humanistik bagi setiap warga negara (Sudianing & Seputra, 2019:120). Pembangunan ini bersifat terkoordinasi, bertujuan untuk memberikan legitimasi yang sah terhadap beragam opsi yang tersedia bagi setiap warga negara, sehingga mereka dapat melengkapi dan mencapai aspirasi-aspirasi mereka yang paling manusiawi.

Saat ini, setiap negara berupaya memberikan kesejahteraan kepada penduduknya melalui pembangunan infrastruktur; pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai bentuk pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, dan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pengeluaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan untuk sektor infrastruktur, terutama untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya dan jembatan (Huda & Sumiati, 2019: 90). Dana ini disalurkan melalui anggaran Departemen Pekerjaan Umum sebagai upaya konkret dalam mendukung pembangunan dan perawatan sarana transportasi.

Tujuan pembangunan jalan adalah untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem transportasi, proyek infrastruktur jalan mencakup perencanaan tata ruang, integrasi dengan sistem transportasi nasional, dan mematuhi standar keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam proses pembangunan ini, tiga elemen utama ekonomi, sosial, dan lingkungan harus diperhatikan secara bersamaan.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor kritis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila suatu wilayah memiliki sistem jalan yang efisien, dampak positifnya juga akan dirasakan dalam pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, ketidakmemadainya atau kurangnya infrastruktur jalan di suatu daerah dapat menyebabkan penurunan ekonomi lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017–2022 akan mencakup visi, misi, dan program bupati, sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan, keuangan, dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Setiap komponen dibuat dengan mempertimbangkan skema pembiayaan lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah mempercepat proses ini. Menurut Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan, yang mencakup pengerasan, perluasan, dan penanganan lubang di jalan yang rusak.

Menurut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan umum di bidang sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa

Konstruksi, dan Penataan Ruang. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pelayanan Teknis Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

**Tabel 1.1 Data Base Jalan Kabupaten Bireuen**

No	Nama Kecamatan	Kondisi			
		Baik	Sedang	Rusak ringan	Rusak berat
		%	%	%	%
1	Samalanga	80	5	5	10
2	Simpang mamplam	75	5	5	15
3	Pandrah	65	5	5	25
4	Jeunieb	60	5	5	30
5	Peulimbang	70	5	3	22
6	Peudada	50	10	5	35
7	Jeumpa	65	10	10	15
8	Kuala	90	3	2	5
9	Kota juang	80	10	5	5
10	Juli	70	5	5	20
11	Peusangan	80	10	5	5
12	Peusangan Selatan	30	10	10	50
13	Peusangan Sibbleh Krueng	30	10	10	50
14	Jangka	60	5	5	30
15	Kuta blang	40	10	5	45
16	Makmur	35	20	10	35
17	Gandapura	30	20	5	45

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, terungkap bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten tersebut belum mencapai tingkat optimal jika dibandingkan dengan provinsi Yogyakarta. Menurut data Kementerian PUPR, tingkat kemantapan jalan nasional di Yogyakarta mencapai 99,71%, menjadikannya provinsi dengan kemantapan jalan nasional tertinggi di Indonesia. Hal ini terkonfirmasi melalui laporan pada salah satu platform media cetak online, <https://data/indonesia.id/infrastruktur/detail/kondisi-jalan-terbaik-ada-di->

yogyakarta. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi.

1. Sebagian besar jalan di Kabupaten Bireuen mengalami kerusakan hingga mencapai sekitar 50%.
2. Belum ada tindakan lanjutan dari pihak Dinas tersebut.

Berbagai masalah muncul sebagai dampak dari kondisi tersebut, seperti peningkatan tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan dan lubang-lubang di jalan. Hal ini dapat ditemukan dalam salah satu sumber berita cetak/online di <https://www.kba.one/news/sering-terjadi-kecelakaan-jalan-di-bireuen-penuh-lubang/index.html>.



**Gambar 1.1 Orang Kecelakaan Dan Kondisi Jalan**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen?

2. Apa saja hambatan implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah konsentrasi pada tujuan penelitian yang sedang dilaksanakan. Untuk mempermudah langkah-langkah observasi, penting bagi peneliti untuk dengan jelas menyatakan fokus penelitian. Fokus penelitian memiliki tujuan untuk menetapkan batasan pada ruang lingkup penelitian, memungkinkan pemilihan data yang relevan dan mengecualikan yang tidak relevan. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat difokuskan pada aspek yang paling penting, tanpa mencakup informasi yang meskipun menarik namun tidak relevan. Oleh karena itu, penulis menetapkan fokus utama penelitian ini pada:

1. Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen. Di fokuskan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.
2. Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Rumusan tujuan penelitian merujuk pada kalimat yang mengindikasikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai, yakni sesuatu yang dapat diperoleh sebagai hasil dari kegiatan penelitian. Tujuan penelitian mencerminkan aspirasi peneliti untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang

diidentifikasi dalam rumusan masalah, dan juga mencerminkan seluruh proses penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Bireuen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian mencakup dua aspek utama, yakni kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang mungkin muncul pada objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait dengan masalah ini.